Laporan Earthworm Foundation
terkait Rencana Aksi dengan Unit Operasi Wilmar di Sumatera Barat
Mei 2021

1. Proses Resolusi dengan Masyarakat Koto Baru dan Kinali dan PT PMJ

Seperti yang dijelaskan dalam laporan sebelumnya, situasi di PT PMJ terbilang kompleks karena melibatkan banyak pihak dan berbagai kepentingan. Kerumitan ini tidak hanya disebabkan oleh operasi Wilmar di masa lalu, tetapi juga berhubungan dengan dinamika sosial, perubahan sosial, adat istiadat, dan tradisi. Dalam hal ini, EF berkewajiban untuk menghormati struktur dan proses adat setempat dan menghindari intervensi yang tidak tepat dan kesimpulan yang bias. Tanggung jawab EF adalah memfasilitasi semua pemangku kepentingan untuk berdiskusi secara konstruktif. Untuk memastikan bahwa proses resolusi ini dapat berjalan, EF dan Wilmar berkomitmen untuk menghadapi situasi yang ada secara strategis, dan mengidentifikasi isu-isu prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Laporan sebelumnya juga menyebutkan bahwa salah satu pihak terkait dalam proses ini adalah koperasi pengelola areal plasma yang memasok TBS ke PT PMJ.[1]. EF akan terus berkomunikasi dengan koperasi ini. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk memperkuat manajemen dan operasional koperasi untuk memastikan bahwa, sebagai pemasok independen untuk Wilmar, koperasi ini dapat memenuhi persyaratan 'Kebijakan NDPE Wilmar yang diperbarui pada 2019.

Komunikasi dengan koperasi juga menjadi kunci untuk menindaklanjuti insiden sengketa tanah yang dilaporkan oleh Southeast Asia Globe pada Juni 2020[2]. Setelah verifikasi lapangan yang dilakukan pada bulan Agustus 2020, EF tertarik untuk memahami koperasi ini lebih lanjut, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berpotensi terlibat dalam isu ini.

[1]Koperasi ini awalnya didirikan untuk mengelola plasma perusahaan. Selama beberapa tahun pertama, PT PMJ memberikan dukungan finansial dan manajemen kepada koperasi ini. Koperasi tersebut sekarang telah beroperasi sebagai organisasi independen tanpa pengawasan manajerial atau keuangan dan bantuan dari PT PMJ, dan tetap sebagai pemasok buah-buahan untuk pabrik PT PMJ.

[2] Berdasarkan artikel ini, EF melakukan verifikasi lapangan pada bulan Agustus 2020, di mana EF bertemu dengan salahsatu anggota masyarakat yang muncul dalam video berita tersebut. EF juga mencatat koordinat areal yang disengketakan. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa areal yang disengketakan tersebut berada di luar konsesi PT PMJ.

Status: Masih berjalan

Langkah selanjutnya:Terus memfasilitasi para pemangku kepentingan, termasuk; perusahaan, koperasi, dan masyarakat lokal.

**Angka 1: EF dan Wilmar berdiskusi dengan Kepala Koperasi**

**Angka 2 Diskusi EF dengan salah satu tokoh adat Koto Baru**

2. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan organisasi masyarakat di Pasaman Barat

   EF terus berkomunikasi dengan Nagari Institute (NI), sebagai salah satu lembaga yang banyak memberikan pendampingan kepada masyarakat di Pasaman Barat. Kami menginformasikan pada NI tentang rencana Wilmar untuk mengembangkan prosedur pengaduan di tingkat unit. NI menekankan perlunya men-diseminasi prosedur ini kepada semua pihak, terutama masyarakat sekitar. Prosedur ini tidak hanya membuka pintu bagi publik dan pihak eksternal untuk dapat berkomunikasi dengan Wilmar secara lebih konstruktif. Tetapi ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi Kebijakan NDPE Wilmar, di mana Wilmar berkomitmen untuk menyelesaikan setiap konflik dan pengaduan melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif.

   Status: Masih berjalan

   Langkah selanjutnya:Melanjutkan komunikasi dan dialog dengan NI

3. Penguatan Prosedur Penanganan Keluhan

   Sejak Agustus 2020, EF telah membantu pengembangan prosedur untuk meningkatkan efektivitas proses penanganan keluhan di perusahaan subsidiari Wilmar di tingkat unit. Proses ini sejalan dengan upaya Wilmar yang lebih luas di tingkat grup, seperti pembaruan kebijakan No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) pada 2019, serta peresmian protokol No Exploitation yang dikembangkan melalui kemitraan dengan organisasi-organisasi ahli hak pekerja dan hak tenurial dari Verite. EF, dan Landesa.

**Angka 3 Diskusi EF dan Wilmar untuk memperkuat Prosedur Penanganan Keluhan**

Ruang lingkup prosedur penanganan keluhan untuk perusahaan di tingkat unit ini mencakup semua keluhan yang berasal dari para pemangku kepentingan eksternal di tingkat lokal mengenai implementasi kebijakan sosial, lingkungan dan kebijakan lain yang terkait dengan dampak kegiatan operasional di anak perusahaan tingkat unit.

Draf prosedur ini akan diujicobakan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa prosedur tersebut cukup matang sebelum difinalisasi dan diterapkan. Setelah proses uji coba dan penyesuaian-penyesuaian lainnya, semua pekerja di tingkat unit akan menerima sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan bahwa staf Wilmar; mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan langkah-langkah yang tercantum dalam prosedur tersebut. EF dan Wilmar juga akan memastikan bahwa prosedur ini disosialisasikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait yang relevan.

Status: Masih berjalan

Langkah selanjutnya: Memfinalisasi prosedur sebelum melakukan pelatihan untuk staf lapangan dan sosialisasi ke masyarakat.